ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu

Oleh:
Siska Yona Melati
2263201011

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu berdasarkan teori implementasi kebijakan Hill dan Hupe (2014), yang meliputi aktor pelaksana, diskresi, interaksi jaringan, konteks lokal, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengembangan kawasan wisata yang ditandai dengan kurangnya pemeliharaan fasilitas, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Pokdarwis, pedagang, dan wisatawan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kawasan wisata Pantai Jakat telah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih kurangnya pemeliharaan fasilitas wisata, keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antaraktor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan peran Pokdarwis, pemeliharaan fasilitas, dan pemberdayaan masyarakat agar pengembangan kawasan wisata Pantai Jakat dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Kawasan Wisata, Pantai Jakat.

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION IN THE DEVELOPMENT OF THE JAKAT BEACH TOURISM AREA IN BENGKULU CITY

By:
Siska Yona Melati
2263201011

This study aims to analyze the implementation of policies for the development of the Jakat Beach tourism area in Bengkulu City based on the policy implementation theory of Hill and Hupe (2014), which encompasses implementing actors, discretion, network interaction, local context, and community participation. This study was motivated by the suboptimal development of the tourism area, as indicated by inadequate facility maintenance, suboptimal coordination among stakeholders, and low levels of community participation.

This research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation involving informants from the Bengkulu City Tourism Office, Tourism Awareness Group (*Kelompok Sadar Wisata*—Pokdarwis), local vendors, and tourists. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, while data validity was ensured through source, technique, and time triangulation.

The results show that the implementation of the policy for developing the Jakat Beach tourism area has been carried out but remains suboptimal. This is reflected in inadequate maintenance of tourism facilities, limited budget availability, suboptimal coordination among implementing actors, and low levels of community participation in the management of the tourism area. Therefore, improvements in coordination, strengthening the role of Pokdarwis, regular facility maintenance, and community empowerment are needed to ensure that the development of the Jakat Beach tourism area can be implemented effectively and sustainably.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Area Development, Jakat Beach

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata termasuk industri yang cukup berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi wisatawan. Ketika pariwisata di suatu wilayah berkembang, hal ini bisa memacu pertumbuhan wilayah itu sendiri, sebab kegiatan wisata memunculkan permintaan baru, baik dari sisi belanja masyarakat maupun investasi, yang ujungnya turut mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah. Agar kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi, dibutuhkan investasi pada sektor pendukung, misalnya transportasi, komunikasi, perhotelan, dan berbagai jenis akomodasi lain (Spillane, 1994). Sejumlah penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara perkembangan sektor pariwisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Mudrikah, 2014 dalam (Riski Anggraini, 2021)).

Berkembangnya sektor pariwisata membawa manfaat positif, antara lain menambah devisa negara sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai destinasi wisata (Cahyono, 2015 dalam Rizqy, 2024). Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata berbasis nilai-nilai lokal. Pendekatan ini dinilai relevan dalam memperkuat pemasaran destinasi wisata yang memiliki keterkaitan erat dengan unsur budaya. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tuntutan untuk meningkatkan kualitas destinasi dan daya saing pariwisata juga semakin besar. Salah satu faktor yang memengaruhi daya saing tersebut adalah

kemampuan sumber daya manusia, khususnya pemandu wisata, dalam berkomunikasi secara efektif dengan wisatawan (Rizqy, 2024).

Pariwisata merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terutama ketika dikelola secara tepat sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.
Melimpahnya sumber daya alam di Indonesia, ditambah letak geografisnya sebagai negara kepulauan dan beragamnya suku serta budaya, membuat sektor pariwisata menjadi salah satu andalan dalam menambah pemasukan devisa negara. (Rahma, 2021) dalam (Indarti & Darmi, 2025)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi wewenang sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk mengurus jalannya pemerintahan dan menjalankan pembangunan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki demi kemajuan daerah, termasuk pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor strategis (Rahmadi et al., 2021).

Provinsi Bengkulu berpeluang cukup besar mengembangkan pariwisata menjadi destinasi unggulan tingkat nasional, karena garis pantainya membentang sekitar 525 kilometer. Kondisi ini membuat wisata pantai menjadi salah satu sektor unggulan bagi daerah. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah, termasuk

Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayahnya. Salah satu destinasi wisata pantai yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Pantai Jakat yang terletak di Kota Bengkulu (Rahmadi et al., 2021).

Kota Bengkulu memiliki banyak pilihan objek wisata, baik yang alami, buatan, maupun bernuansa budaya, yang layak dikunjungi. Beberapa di antaranya adalah Pantai Panjang, Pantai Jakat, Pantai Pasir Putih, Danau Dendam Tak Sudah, Kawasan Tapak Paderi, Kawasan Pulau Bai, dan Kawasan Bahari Pulau Tikus. Pemanfaatan potensi wisata tersebut dilakukan melalui pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana serta prasarana pendukung guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung (Rahmadi et al., 2021).

Pantai Jakat termasuk kawasan wisata pantai yang jaraknya sekitar satu kilometer dari pusat Kota Bengkulu, dan daya tarik alamnya tergolong tinggi. Selain menawarkan panorama pantai yang indah, Pantai Jakat juga menyajikan berbagai aktivitas wisata, seperti wisata kuliner, wisata budaya, dan wisata sejarah. Karena posisinya dekat dengan Benteng Marlborough bangunan peninggalan kolonial Inggris yang berdiri sejak tahun 1714 kawasan ini punya nilai lebih sebagai tempat wisata yang juga bersifat edukatif. Dengan berkembangnya objek wisata kawasan Pantai Jakat, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan akan terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata daerah(Rahmadi et al., 2021).

Perda Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dijadikan landasan hukum dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata di daerah ini. Peraturan daerah ini mengatur perencanaan kepariwisataan, pengelolaan daya tarik wisata, peran pemerintah daerah, peran masyarakat, serta peran pelaku usaha pariwisata. Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan pada pemanfaatan potensi wisata daerah secara berkelanjutan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan nilai sosial budaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil pengamatan awal di lapangan, kawasan wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu ternyata sudah menjadi sasaran kebijakan pengembangan dari pemerintah daerah. Wujud kebijakan tersebut terlihat dari dibangunnya beberapa fasilitas pendukung, seperti tempat parkir, kamar bilas, taman, dan bangunan untuk pedagang makanan.Implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Fasilitas yang dibangun oleh pemerintah sebagian tidak dimanfaatkan bahkan mengalami keterbengkalaian. Bangunan yang didirikan oleh pedagang ilegal termasuk fasilitas kamar bilas justru digunakan secara aktif oleh pengunjung. Keberadaan bangunan tersebut tidak tercatat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah telah membentuk Kelompok Sadar Wisata sejak dua tahun terakhir. Pelaksanaan tugas serta fungsi Pokdarwis belum menunjukkan kinerja yang efektif dalam mengoordinasikan pengelolaan kawasan wisata Pantai Jakat.

Kondisi kebersihan kawasan wisata Pantai Jakat menunjukkan permasalahan serius. Sampah ditemukan menumpuk di berbagai titik kawasan pantai. Sarana pendukung kebersihan berupa tempat sampah tidak tersedia secara memadai. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata dengan kondisi faktual di lapangan. Pemanfaatan fasilitas wisata, peran kelembagaan Pokdarwis, serta kontribusi kawasan wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan pariwisata daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masih ada celah penelitian (research gap) mengenai bagaimana kebijakan pengembangan kawasan wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu ini benar-benar dijalankan.

Masalah-masalah di atas, bisa disimpulkan bahwa pengembangan kawasan wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu masih menyimpan sejumlah kendala, mulai dari fasilitas wisata yang belum dimanfaatkan secara maksimal, peran Pokdarwis yang masih lemah, pengelolaan kebersihan kawasan yang masih kurang, hingga kontribusi kawasan wisata terhadap PAD yang belum terlihat maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kawasan wisata Pantai Jakat belum berjalan secara optimal.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk menelusuri lebih jauh persoalan-persoalan yang ada, sehingga peneliti mengangkat judul 'Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana implementasi kebijakan dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik dan permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menganalisis bagaimana kebijakan pengembangan kawasan wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu ini dijalankan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, untuk lebih memahami pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan wisata Pantai Jakat, khususnya terkait pemanfaatan fasilitas wisata, pengelolaan kebersihan kawasan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan kontribusi kawasan wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Secara Teoritis

   a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa turut memperkaya wawasan di bidang ilmu administrasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.

serta faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan kawasan wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu.

b. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan yang bermanfaat bagi peneliti lain, sekaligus menjadi langkah awal yang mendorong munculnya penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik serupa.